

# SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA GRATIFIKASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Toha Andiko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Email: toha.andiko@gmail.com

**Abstract:** *“Sanctions for Givers and Recipients of Gratification Based on Islamic Criminal Law.”* In various Hadith literature, the status of gratification perpetrator has not been fully explained. This can be seen from differences among scholars whether it is included into bribery or a halal gift. On the other hand the status of bribes and giving prizes is clear enough, unlike the status of gratification which still in debate among scholars. Similarly, sanctions for the perpetrators of gratification are not mentioned explicitly. The sanctions are more dominated by moral aspect that still needs further interpretation. The results of this study conclude that gratification in the sense of giving prizes in the form of money, bonuses or other services that are lawful to officers or officials is essentially legal as long as there is no agreement in the beginning, not excessive, and not given in advance (before the affairs are completed). However, the sanctions for those perpetrators of gratification in the sense of giving the prizes promised at the initial term, or granted before the completion of the affairs, in Islamic criminal law those givers and the recipients may be subject to punishment or in Islam known as *takzir* (the form and size of the punishment shall be submitted to an official judge appointed by the legitimate government).

**Keywords:** sanction, gratification, Islamic criminal law

**Abstrak:** *“Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam.”* Dalam berbagai literatur hadis, status pelaku gratifikasi belum dijelaskan secara tuntas. Ini tampak dari perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah termasuk suap yang haram atau hadiah yang halal. Sebab jika status suap dan hadiah sudah jelas, berbeda halnya dengan status hukum gratifikasi. Begitu pula sanksi bagi pelaku gratifikasi tidak disebutkan secara tegas. Sanksi dimaksud lebih didominasi pada aspek pembinaan moral yang masih perlu interpretasi lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah baik berupa uang, bonus, atau jasa lainnya yang halal kepada petugas atau pejabat pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak ada perjanjian di awal, tidak berlebihan, dan tidak diberikan di muka (sebelum urusan selesai). Terkait dengan sanksi pelaku gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah yang yang dijanjikan di awal, atau diberikan sebelum selesainya urusan, maka dalam pidana Islam bagi pemberi dan penerima dapat dikenai hukuman takzir (bentuk dan besar kecil hukumannya diserahkan kepada hakim resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah).

**Kata kunci:** sanksi, gratifikasi, hukum pidana Islam

## Pendahuluan

Pada bulan Mei 2013, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjabat Gubernur Jakarta mendapat hadiah sebuah gitar bas merk Ibanez berwarna coklat milik milik Robert Trujillo, dari band rock idolanya Metallica yang diberikan oleh Jonathan Liu, seorang promotor yang akan mengundang Metallica konser di Jakarta. Selain tanda tangan, ada juga tulisan berisi pesan dari Trujillo: *“Giving back! To Jokowi, Keep playing*

*that cool funky bass!”*. Namun, beberapa hari kemudian, Jokowi melaporkan hadiah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dinilai apakah layak dia menerimanya, atau tidak karena masuk kategori gratifikasi.<sup>1</sup> Merespons sikap Jokowi tersebut, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supraddiono berkomentar “Pak Jokowi telah memberikan contoh yang baik dengan

<sup>1</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kado-gitar-bas-jokowi.html>, diakses tanggal 7 Juli 2015

transparansi atas pemberian gratifikasi tersebut dan tidak menyembunyikannya”, sebab menurut undang-undang, wajib dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Jadi, KPK nanti akan menetapkan status boleh diterima gratifikasi tersebut atau menjadi milik negara dalam jangka waktu 30 hari oleh pimpinan KPK.<sup>2</sup>

Pada kesempatan lain, KPK yang sudah menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas, menambah pasal yang disangkakan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif tersebut. Sejak 10 Oktober 2013, Akil juga disangka menerima gratifikasi atau pemberian hadiah terkait penanganan perkara di MK. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya menambah sangkaan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Akil. “Setelah dilakukan pengembangan penyidikan, AM (Akil Mochtar) juga disangka melanggar Pasal 12 B selain Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP”.<sup>3</sup>

Berbeda dengan dua kasus di atas, Romli, Kepala kantor KUA Kediri menjadi terdakwa di sidang dugaan gratifikasi biaya nikah di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Sidoarjo. Ia diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 12 huruf e dan g UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, dalam keterangannya, Romli mengaku uang yang didapat oleh dirinya tidak sepenuhnya digunakan yang bersangkutan. Dari uang gratifikasi senilai Rp195 ribu, hanya Rp50 ribu yang digunakannya, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional KUA.<sup>4</sup>

Menyikapi masalah di atas, pemerintah akhirnya merampungkan pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Pencatatan Nikah, Jumat 7 Februari 2014. Berdasarkan PP tersebut, pasangan yang

menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari kerja akan dibebankan biaya Rp50 ribu, sedangkan mereka yang menikah di luar KUA dan di luar jam kerja dibebankan biaya Rp600 ribu. Standardisasi biaya pernikahan yang berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah ini diperlukan untuk menghindari masalah hukum yang bisa menimpa penghulu. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan semua penerimaan honor di luar biaya nikah resmi adalah gratifikasi.

Walaupun demikian, pada kasus-kasus lain banyak juga yang menimbulkan polemik mengenai penerapan kriteria gratifikasi ini. Di daerah Madura misalnya, di sana masyarakatnya sangat menghormati ustadz/kyai/ulamanya dengan terbiasa memberi uang atau barang demi mengharap barakah. Petugas KUA yang umumnya juga muballigh ketika menikahkan dan selesai memberi khutbah nikah selalu mendapat amplop berisi sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan nasehat. Posisi petugas KUA ini tentu sulit dipisahkan antara jabatannya sebagai petugas KUA dan sebagai ulama yang biasa menerima hadiah dari masyarakat setempat sebagai wujud apresiasi. Apakah ini termasuk gratifikasi? Begitu juga dosen yang PNS ketika selesai membimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswanya, lalu mendapat hadiah sebagai wujud terima kasih dari mahasiswanya, apakah termasuk gratifikasi? Termasuk pejabat di suatu instansi pemerintah yang sudah lama berkenalan dengan seseorang, lalu menerima hadiah karena budaya saling memberi yang sudah mengakar di suatu daerah, dan jika tidak diterima dianggap sombong, apakah ini juga kategori gratifikasi? Lalu apakah semua pemberian yang diterima oleh pejabat/PNS harus dilaporkan ke KPK walaupun nilainya kecil? Ini tentu menjadi masalah baru.

### Pengertian Gratifikasi dan Suap

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat Indonesia adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada petugas pelayanan masyarakat atau pejabat, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh sebab itu, berapa pun nilai gratifikasi yang diterima

<sup>2</sup> <http://news.detik.com/read/2013/05/06/074047/2238573/10/kpk-apresiasi-transparansi-jokowi-yang-dapat-hadiah-gitar-bass-metallica>, diakses tanggal 9 Juli 2015

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/16/2044049/Akil.Mochtar.Disangka.Terima.Gratifikasi.terkait.Perkara.Lain>, diakses 7 Agustus 2015

<sup>4</sup> <http://news.okezone.com/read/2013/12/05/521/907754/uang-gratifikasi-pernikahan-digunakan-untuk-operasional-kua>, diakses 6 September 2015

seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Pada prinsipnya gratifikasi bersifat netral dan wajar, namun gratifikasi dapat dianggap sebagai suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Istilah gratifikasi pada awalnya berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah”. Dalam kamus Black’s Law Dictionary disebutkan pengertian gratifikasi atau *gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” (sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan). Walaupun terkadang sangat sulit membedakan antara hadiah (*gift*) dengan suap (*bribe*) ketika berhadapan dengan pejabat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi—yang berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya, *gratification*—diartikan sebagai hadiah uang. Pengertian gratifikasi dalam kamus hukum yang membatasi hanya pada hadiah yang berupa uang seperti extra pay, bonus, allowance (uang bantuan).

Dalam konteks hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi tidak sama persis dengan apa yang tertera dalam KBBI maupun kamus hukum. Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang dapat dilihat dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kiranya ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa *pertama*, baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. *Kedua*, pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan yang negatif. *Ketiga*, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut KBBI jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum, obyek gratifikasi tidak ditentukan.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 yang berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 yang berbunyi: “Ketentuan

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), Edisi Ketiga, Cet. ke-3, h 371.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Adapun penjelasan aturan Hukum Pasal 12 UU No. 20/2001 menyebutkan sanksinya: “Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar bagi 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001).<sup>6</sup>

Sedangkan suap berasal dari kata “bribery” (bahasa Inggris) ialah “promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the gift”. Perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi, antara lain:

- 1) Suap, penekanannya pada keaktifan masyarakat/ pengguna jasa/rekanan kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan yang berlawanan tugas dan fungsinya (*conflict of interest*).

Suap menurut Pasal 3 UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yaitu *barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum...*”

- 2) Pemerasan, lebih ditekankan pada keaktifan pejabat publik dalam transaksi tertentu yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- 3) Gratifikasi, menurut Penjelasan Pasal 12B

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu “*pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*”<sup>7</sup>

Sedangkan suap dalam buku KPK ialah suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK: a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK; b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK; c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK; d. Pasal 13 UU PTPK; e. Pasal 12 huruf a PTPK; f. Pasal 12 huruf b UU PTPK; g. Pasal 11 UU PTPK; h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK; i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK; j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK; k. Pasal 12 huruf c UU PTPK; l. Pasal 12 huruf d UU PTPK.

Dari definisi tersebut, tampak bahwa suap dapat berupa janji, pemerasan bersifat transaksional, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap dan pemerasan ada unsur “**mengetahui atau patut dapat di duga**” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dari pemaparan di atas, jelas pula kiranya perbedaan antara gratifikasi dengan hadiah dan sedekah. Kalau hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Sedangkan gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas,

<sup>6</sup> <http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/mn-ketentuan-gratifikasi>, diakses 11 Oktober 2015

<sup>7</sup> Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bayu Media, 2005, Cet ke-2. h. 261.



independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Di dalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Jadi, selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

## Macam dan Jenis Gratifikasi

### *Gratifikasi Positif*

Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apa pun. Dalam hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki menyebut gratifikasi merupakan hal yang wajar. Terutama dalam dunia bisnis. Pernyataan tersebut disampaikan Ruki pada acara Apindo CEO Gathering, di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Senin (21/9/2015). Acara tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan. Di acara tersebut Ruki mencontohkan ketika seorang pejabat negara pergi dinas ke luar negeri kemudian diundang makan malam, hal tersebut dapat diartikan sebagai gratifikasi. Akan tetapi, kata Ruki, hal tersebut merupakan gratifikasi wajar. Karena itu, Ruki meminta kepada pejabat

negara agar bisa membedakan antara gratifikasi wajar dan gratifikasi suap.

Berkaitan dengan hal ini, Jaksa Agung HM. Prasetyo mengomentari “Saya kira pak Ruki itu tadi bicara sejarah, tapi lebih baiknya tanya pak Ruki, saya tidak bisa komentar,” ujar Prasetyo, saat dihubungi, Senin (21/9/2015). Namun, kata Prasetyo Undang-Undang telah mengatur terkait gratifikasi. Sebab itu, jika memang pemberian dari seseorang tidak melanggar UU, menurut Prasetyo merupakan hal yang wajar.<sup>8</sup>

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Supradio pernah menjelaskan bahwa terdapat 12 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK. Dikatakan Giri, sesuai dengan Surat KPK No. B-143 tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, keduabelas jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK adalah: (1) jika pemberian gratifikasi itu disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; (2) penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00; (3) Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00; (4) pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak senilai Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama; (5) pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

Giri melanjutkan, berikutnya adalah: (6) pemberian hidangan atau sajian yang berlaku Umum; (7) pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti, dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan; (8) penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; (9) penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang

<sup>8</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/21/nv10xs330-ini-komentar-jaksa-agung-soal-ucapan-ruki-terkait-gratifikasi-wajar>, diakses 21 September 2015

berlaku umum; Selanjutnya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK adalah: (10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum; (11) penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (12) penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi.<sup>9</sup>

Di luar kedua belas jenis gratifikasi itu maka wajib dilaporkan kepada KPK. Maka untuk memberantas korupsi, perlu dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh mulai dari penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, kelengkapan dan kecukupan hukum, serta komitmen politik dan pimpinan.

### **Gratifikasi Negatif**

Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seseorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera.

Memberi hadiah untuk dosen atau pembimbing skripsi biasa dilakukan para mahasiswa sebagai bentuk wujud terima kasih. Namun ternyata hadiah itu bisa masuk dalam kategori gratifikasi. “Rektor, dosen itu termasuk penyelenggara negara. Jadi menerima hadiah apapun itu dilarang,” ucap Plt Pimpinan KPK, Johan Budi dalam seminar ‘Langkah Cerdas Cegah Korupsi’ di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah, Tangsel, Rabu (9/9/2015). Johan mengimbau agar para mahasiswa yang lulus ujian skripsi untuk tidak memberikan hadiah kepada dosen penguji atau pembimbing. Apalagi jika nilai hadiahnya itu cukup mahal.

“Seperti kalau kalian (mahasiswa) lulus ujian

skripsi jangan sampai kalian memberi hadiah kepada dosen pembimbing atau penguji. Walau untuk ungkapan terima kasih. Cukup ucapan terima kasih saja.”<sup>10</sup>

Tindakan lain yang memicu adanya penyelewengan terhadap uang-uang negara yang kemungkinan besar bisa dianggap sebagai tindakan gratifikasi yang potensial tak tersentuh hukum ialah cashback. Cashback adalah sebuah bahasa “kode” yang sebetulnya memiliki maksud yang sama dengan gratifikasi. Namun, tindakan ini masih berada di “Grey Area” hukum negara Indonesia. Orang Indonesia memang cukup pintar memainkan fakta memuluskan niat berkorupsi agar tidak tercium oleh hukum. Maka keluarlah istilah yang bernama *cashback*.

*Cashback* biasanya terjadi ketika seorang pejabat memuluskan proyek yang ditenderkan Pemerintah kepada pemenang tender untuk memberikan dia imbalan berupa uang. Nah, istilah itu dinamakan *cashback*, namun memang hal itu atas dasar kesepakatan antara pelaku korupsi dan pemenang proyek, sehingga istilah tersebut kemudian lebih dikenal dengan uang komisi. Ini adalah tindakan gratifikasi, dan harus dilaporkan.

Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain dan perspektif serta nilai-nilai keadilan dalam hal ini terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan seseorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara objektif, perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Di negara-negara maju, pemberian gratifikasi bagi kalangan birokrat dilarang keras. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan bocornya keuangan negara yang diakibatkan dari pembuatan kebijakan ataupun keputusan yang independen. Bahkan dikalangan swasta pun gratifikasi dilarang keras dan diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sehingga, pelarangan gratifikasi dalam ruang lingkup Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi Pelayanan Masyarakat pun perlu dilarang dan diberi sanksi yang tegas bagi para pelakunya.<sup>11</sup>

Hal ini karena Pelaksanaan Kegiatan Birokrasi

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/berita/3014458/johan-budi-hadiahi-dosen-saat-lulus-ujian-itu-gratifikasi>, diakses 11 Januari 2016.

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, h. 109, lihat Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2, h. 215.

<sup>9</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kpk-12-jenis-gratifikasi-ini-tidak-perlu-dilaporkan>, diakses 15 Desember 2015

Pelayanan Masyarakat sebagai salah satu sektor strategis yang menguasai atau mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak.

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana di dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.<sup>12</sup>

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Namun, Pasal 12 C UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi dianggap

pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberi dan Penerima Gratifikasi dan Sanksinya

### 1. Status Hukum Pemberi dan Penerima Gratifikasi

Dalam berbagai literatur hadis, status pelaku gratifikasi belum dijelaskan secara tuntas. Ini tampak dari perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah termasuk suap yang haram atau hadiah yang halal. Sebab jika status suap dan hadiah sudah jelas, berbeda halnya dengan status hukum gratifikasi. Begitu pula sanksi bagi pelaku gratifikasi tidak disebutkan secara tegas. Sanksi dimaksud lebih didominasi pada aspek pembinaan moral yang masih perlu interpretasi lebih lanjut. Jika masa Rasulullah dan generasi *salaf al-shâlih* tingkat keimanan masyarakat masih tinggi dan moralitas mereka masih terjaga baik dan mudah untuk dibina, maka masa kini di saat mulai menipisnya perhatian terhadap agama dan longgarnya moralitas masyarakat yang terbukti dengan banyaknya tindakan-tindakan tercela yang merugikan masyarakat banyak, sudah selayaknya masalah gratifikasi ini ditinjau kembali status hukumnya. Ini dimaksudkan jangan sampai masalah gratifikasi yang mengarah pada suap/korupsi terselubung membudaya, dan di sisi lain agar jangan sampai niat yang baik (memberi sebagai hadiah atau sedekah biasa sebagai bentuk penghormatan) ternodai dengan pelanggaran agama karena generalisasi makna dan praktek gratifikasi secara sepihak. Ini bisa berakibat kontra produktif yang berujung pengabaian karena sulitnya menghindari. Padahal, prinsip utama dalam ajaran Islam adalah meniadakan kesulitan (*‘adam al-haraj*).

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa setidaknya gratifikasi dalam makna *risywah*, suap, ada yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya dan ada yang disepakati halal

<sup>12</sup> M. Khoidin, “Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap dan Korupsi”, Artikel dimuat dalam *Harian Suara Karya*, tanggal 27 Agustus 2013

hukumnya.<sup>13</sup> *Risywah* yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar atau dengan kata lain suap yang hukumnya haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama hukumnya halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (الراشي) atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan suap yang halal ini memang tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama, sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motifasi penyuap ketika memberikan suapnya kepada penerima, sehingga ada yang hanya dianggap halal bagi penyuap tetapi tetap haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (الآخذ). Di antara ulama yang menjelaskan secara mendetail persoalan ini adalah Ibnu Taimiyyah.<sup>14</sup> Ibnu Taimiyyah

menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan tetap saja haram bagi penerima suap tersebut. Dalam beberapa referensi *syarah* hadis dan buku-buku fikih, alasan atau dalil ini tidak penulis temukan, tetapi Ibnu Taimiyah dalam *Majmû' Fatâwânya* mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta beliau.<sup>15</sup>

Atas dasar hadis inilah muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima atau dalam rangka menolak kemudharatan, ketidakadilan dan kezaliman yang mengancam atau mengganggu diri pelaku. Dalam kasus yang dialami Rasulullah saw sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad di atas adalah rasa ketidaknyamanan Nabi saw atas tindakan seseorang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Sangat boleh jadi orang-orang yang meminta kepada beliau itu sedikit memaksa dan tanpa ada rasa malu, maka akibatnya beliau sangat merasa terganggu sehingga beliau berikan dua dinar, menurut informasi yang didengar Umar melalui seseorang dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada Nabi saw beliau beritahu bukan hanya 2 dinar, melainkan sejumlah besar uang 10 sampai dengan 100 dinar bahkan terdapat riwayat bahwa uang yang beliau berikan itu sejumlah 10 sampai 100 atau 200 dinar, memang dalam hal ini perawi yang ragu tentang jumlah persisnya.

Melalui hadis ini, secara jelas bisa dipahami bahwa tampaknya Rasulullah saw sudah bosan bahkan telah muak dengan ulah *tukang palak* yang

<sup>13</sup> Jenis suap yang oleh para ulama dinyatakan halal ini oleh al-Syaukani dalam *Nail al-Autâr*, jilid IX h. 172 ditolak secara tegas, suap dalam bentuk-bentuknya yang khusus dan dengan tujuan apapun tetap haram sebab hadis mengenai risywah yang sangat terkenal itu tidak bisa ditakhsis kecuali dengan dalil yang *maqbul* (kuat dan bisa diterima), bukan sekedar dengan perkiraan dan pertimbangan yang tidak mantap. Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan al-Syaukani tanpa harus mengkritik pendapat jumhur ulama yang telah sepakat menghalalkan jenis risywah yang tujuannya untuk membela, menuntut dan memperjuangkan hak dan atau untuk menolak ketidakadilan. Sebab untuk konteks Indonesia saat ini, kalau mengikuti pendapat jumhur ulama tersebut akan sangat rentan dengan gagalnya pemerintah dalam memberantas praktek KKN di negeri ini.

<sup>14</sup> Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah kepada petugas agar dia melakukan untuknya sesuatu yang tidak diperbolehkan adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerimanya, karena hal ini termasuk suap yang disabdakan oleh Nabi saw. "Allah mengutuk penyuap dan penerima suap" sedangkan jika seseorang memberi hadiah agar terhindar dari kezaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan kepadanya maka hadiah semacam ini hanya haram bagi penerima (الآخذ) tetapi boleh / halal bagi pemberi kalau dia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya, sebagaimana Nabi saw pernah bersabda: sesungguhnya saya akan memberikan kepada salah seorang mereka sebuah pemberian maka akan keluar dari bagian bawah ketiaknya sebuah api ketika itu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah mengapa engkau memberikan (sesuatu) kepada mereka ? beliau menjawab, mereka enggan (tidak bosan-bosan akan terus meminta) padahal Allah tidak berkenan kalau saya bersifat bakhil. Imâm Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnadnya* jilid III h. 4 memberikan penjelasan kata "بناطها" ini dengan kalimat "يعني تكون تحت إبطه يعني نارا" yaitu bagian bawah ketiak akan mengeluarkan api. Hal ini sebagai kecaman bahwa sikap meminta-minta dengan cara memaksa dan dengan

gaya tukang palak (صاحب مكس) ini merupakan perbuatan biadab dan sangat tercela. Lihat Abdurrahmân ibn Qâsim al-Aṣimî al-Najdî al-Hanbalî (ed.), *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), jilid XXI, h. 286.

<sup>15</sup> Riwayat tersebut adalah sebagai berikut, "Dari Abu Sa'îd al-Khudriy, dia berkata Umar berkata, wahai Rasulullah sungguh saya mendengar Fulan dan Fulan berbuat baik dengan pujian sambil keduanya bercerita sesungguhnya engkau memberikan dua dinar. Umar berkata, Nabi saw bersabda, akan tetapi demi Allah si Fulan bukanlah demikian itu, saya sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus, apa yang dia ucapkan bukan seperti itu. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang diminta dari sisiku pada bagian bawah ketiaknya, maksudnya di bawah ketiak akan mengeluarkan api. Umar bertanya, wahai Rasulullah mengapa engkau berikan uang itu kepada mereka ? Rasulullah menjawab, apa yang saya lakukan itu tidak akan membuat mereka bosan, tetapi mereka akan terus meminta, sedangkan Allah tidak berkenan jika saya memiliki sifat bakhil "(HR. Ahmad). Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, jilid III, h. 4.



terus meminta beliau dengan sedikit memaksa. Di sini kemudian beliau memberikan sejumlah harta agar beliau terhindar dari kezalimannya dan agar beliau bisa mendapatkan hak beliau untuk hidup tenang tanpa diganggu oleh peminta-minta yang telah sangat mengganggu beliau.

Pada umumnya ulama memperbolehkan suap yang bertujuan untuk memperjuangkan haknya atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan dirinya. Masalahnya adalah bahwa budaya seperti ini jika saat sekarang dipraktekkan di Indonesia yang sedang berusaha keras untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, jelas justru akan sangat rentan. Sebab orang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapat hak atau supaya selamat dari ketidakadilan dan kezaliman. Sehingga akhirnya ia melakukan penyuapan kepada pejabat atau kepada pihak yang berwenang.<sup>16</sup>

Pendapat yang berkembang di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya suap untuk memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan ini tampaknya bukan berdasarkan pada teks hadis tentang risywah yang berbunyi “لعن الله الراشي والمرثى” (Allah mengutuk penyuap dan yang disuap),<sup>17</sup> tetapi pijakan mereka dari *âtsâr* atau riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in yang ketika itu melakukan praktek penyuapan dalam konteks seperti ini. Di antara riwayat dimaksud adalah apa yang dikemukakan oleh al-Baghawi bahwa diriwayatkan dari al-Hasan, al-Sya'bi, Jabir bin Zaid dan 'Atha, sesungguhnya mereka berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap berdosa ketika dia mendayagunakan/ mengatur diri dan hartanya (untuk melakukan penyuapan) pada saat dia terancam dengan ketidakadilan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Dalam hal ini, penulis masih setuju dengan pendapat Syamsul Anwar bahwa tradisi atau pandangan yang menganggap tidak termasuk suap yang diancam laknat dalam hadis tentang risywah ini, jika penyuapan dilakukan untuk memperjuangkan haknya atau untuk menolak ketidakadilan yang dirasakannya harus sangat dipertimbangkan. Sebab persoalan memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan atau kezaliman ini merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan sulit dicari tolok ukur dan standarisasinya. Di samping itu, situasi dan kondisi Indonesia yang saat ini sedang berjuang dan berusaha kuat untuk memberantas korupsi akan terganggu dengan pandangan tentang diperbolehkannya suap, sogok atau gratifikasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan atau kezaliman ini. Bahkan catatan penting al-Syaukânî dan al-Mubarakfuri bahwa suap dalam konteks ini seyogyanya jangan dilakukan terhadap para hakim dan para pejabat juga harus diperhatikan, jika bangsa besar ini mau selamat.

<sup>17</sup> al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, Beirut : Dâr al-Fikr, tth, jilid IX, h. 172.

<sup>18</sup> Abû Muḥammad al-Husain bin Mas'ûd al-Baghawî, *Syarh*

Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pemberian Ibnu Mas'ud tersebut bukan kepada hakim atau penguasa resmi, tetapi bisa diperkirakan dari data-data lain seperti yang dijelaskan oleh al-Mubarakfuri di atas, bahwa yang beliau sogok bukan hakim atau pejabat, melainkan preman atau sejenis tukang palak (penguasa lahan) sebagai penguasa lahan kawasan Habsyi yang ketika itu telah berada dalam wilayah Islam.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, catatan al-Syaukani dan al-Mubarakfuri menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tidak mudah menyogok hakim dan pejabat dalam rangka mendapatkan hak atau karena takut dizalimi.

Di samping data yang dikemukakan oleh al-Baghawi di atas, Abu Abdullah Abdussalam Alusy dalam *Ibânah al-Aḥkâm* mengatakan bahwa terdapat riwayat yang berasal dari Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain bahwa mereka melakukan *risywah* untuk memperjuangkan hak. Semua ini dikemukakan oleh al-Khitabi dan ia memfatwakan bahwa suap untuk memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak diperbolehkan<sup>20</sup>

Dengan demikian, tampaknya hampir seluruh ulama hadis pada saat memberikan ulasan tentang hadis *risywah* ini selalu mengemukakan tentang jenis *risywah* yang bisa dianggap benar, yaitu jika suap yang dilakukan untuk menuntut dan memperjuangkan hak yang mesti diterima atau suap dalam rangka menolak ketidakadilan.

Hal menarik dalam masalah suap-menyuap ini, dikaitkan dengan pendapatan yang dianggap layak bagi seorang hakim, dijelaskan oleh Muhammad bin Isma'il al-Kahlâni al-Shan'ânî bahwa suap secara ijmak dinyatakan haram, baik diberikan kepada hakim, atau petugas atas nama sedekah maupun bukan diberikan kepada kedua-duanya. Pendapatan yang biasanya diperoleh seorang

*al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., jilid V, h. 330.

<sup>19</sup> al-Mubârak Fûrî, *Tuhfat al-Aḥwadî*, jilid IV, h. 565. Dalam riwayat yang dijelaskan oleh al-Mubarakfuri disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mendapatkan masalah pada saat hendak mengambil harta miliknya sebagai haknya dan dizalimi oleh pihak-pihak tertentu tersebut terjadi di Habsyi. Habsyi adalah Abessinia. Di antara sederetan nama gubernur yang pernah memerintah di sana adalah Abrahah, seorang raja underbaw/dibawah pengawasan atasannya, raja Romawi Timur yang berkedudukan di Konstantinopel. Abrahah dari Abessinia inilah yang pernah menyerang Ka'bah pada hari Senin tanggal 20 April 571 M, pada saat Rasulullah saw lahir. Abrahah dan pasukannya itulah yang oleh Alquran surat al-Fil disebut dengan “*ashâb al-fil*”.

<sup>20</sup> Abû 'Abdullâh 'Abdussalâm 'Allûsy, *Ibânah al-Aḥkâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002, jilid III, h. 88.

hakim terdiri dari empat macam, suap, hadiah, gaji dan rezeki. *Pertama*, suap, jika tujuannya agar hakim memutuskan perkara secara tidak benar, maka status hukumnya adalah haram baik bagi pemberi maupun penerima suap. Tetapi kalau tujuannya agar hakim memutuskan perkara secara benar untuk (menyelesaikan) piutang pihak pemberi suap, maka suap dengan motif ini haram bagi hakim tetapi halal bagi penyuap, sebab tujuannya untuk memperjuangkan hak yang mesti diterimanya. Suap dengan motif ini sama dengan upah bagi pemenang sayembara yang bisa menemukan budak yang kabur, dan sama dengan upah orang yang dipercaya dalam memenangkan persengketaan. Tetapi konon hal ini tetap diharamkan karena bisa menjerumuskan seorang hakim ke dalam dosa. *Kedua*, hadiah, jika hadiah ini diberikan dari seseorang pada saat sebelum penunjukkan seorang hakim yang akan menangani perkaranya, maka status hukumnya tidak diharamkan, tetapi kalau setelah ditentukan hakim yang akan menanganinya, maka tetap haram dan jika hadiah itu berasal dari seseorang yang tidak ada pertengkaran antara dia dan seseorang yang ada bersama dia, maka hadiah itu diperbolehkan, tetapi makruh, dan jika hadiah itu berasal dari seseorang yang mempunyai persengketaan hutang dengan pihak lawan, maka hadiah dalam kasus ini hukumnya haram baik bagi hakim (sebagai penerima) maupun bagi pemberi hadiah.<sup>21</sup>

Dengan penjelasan yang cukup sistematis dan runtut ini al-Shan`ânî sempat memerinci bentuk-bentuk suap dan hadiah tertentu, ada yang dinyatakan halal dan ada yang dinyatakan haram bahkan ada yang sekedar makruh. Namun demikian, tampak jelas dari uraian tentang jenis suap bahwa terdapat bentuk suap yang dianggap halal sebagaimana para ulama hadis pada umumnya, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperjuangkan hak yang mesti diterimanya, dalam contoh penjelasannya disebutkan untuk bisa memperoleh harta miliknya yang masih dalam piutang pihak lain. Di sini, hakim menurut al-Shan`ânî dianggap sebagai pemenang sayembara atau wakil delegasi yang berhasil dalam usaha membela klien,<sup>22</sup>

sehingga wajar jika mendapatkan upah atas jasanya. Dari penjelasan di atas, risywah yang dalam batasan tertentu ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan.

Selanjutnya terkait dengan gratifikasi yang terdiri dari dua macam, maka, gratifikasi positif jelas dibolehkan. Karena gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apa pun. Sedangkan gratifikasi negatif jelas diharamkan karena adanya pamrih yang diharapkan pemberi dari penerima pemberian. Hanya saja, jika dikhawatirkan adanya dampak negatif dari gratifikasi positif, misalnya mempengaruhi keikhlasan pejabat atau pegawai yang bertugas melayani, atau bahkan merusak mental mereka di kemudian hari, maka dalam hal ini sebagai tindakan preventif bisa dilakukan antisipasi dengan menerapkan sadd al-dzari`ah yang hukumnya bisa makruh dan bisa pula berubah menjadi haram. Namun, hal ini harus dilihat dari kasus per kasus dan tidak bisa digeneralisir.

## 2. Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi

Mengenai sanksi terhadap tindakan gratifikasi, pada dasarnya pemberi dan penerima sama kedudukannya. Jika gratifikasi mengarah pada *risywah* positif, maka penerima bisa dikenakan sanksi takzir, sedang pemberi terbebas karena ia memperjuangkan hak yang semestinya ia dapatkan. Selanjutnya untuk gratifikasi positif jelas tidak ada sanksinya karena hukumnya mubah. Sedangkan gratifikasi negatif, baik pemberi maupun penerima bisa dikenakan sanksi hukum takzir yang jenis, bentuk, dan kadar hukumannya bisa diserahkan kepada kebijakan pemerintah setempat yang sah atau hakim yang mewakili atas nama pemerintah.

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi dalam pengertian *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulûl* atau penggelapan yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah qishas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan

<sup>21</sup> al-Shan`ânî, *Subul al-Salâm*, jilid IV, h. 124.

<sup>22</sup> Untuk konteks saat ini konsep al-San`ani tentang “أجرة الوكالة” Honor wakil yang membantu seseorang atau perkara yang dipersengketakan ini adalah berupa tunjangan, ongkos perkara para praktisi hukum, pengacara, advokat dan badan

arbitrase. Penulis memperkirakan bahwa pada saat 245 tahun yang lalu belum ada profesi-profesi dalam bidang peradilan sebagai yang sangat ramai di berbagai tingkat peradilan saat ini.

bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana gratifikasi tidak disebutkan secara jelas oleh Syariat (Allah dan Rasul/Alquran dan hadis) mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi, tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana takzir”<sup>23</sup>

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, memang disebutkan dengan pernyataan “لعن الله الراشي والمرتشى” atau dengan “لعنة الله على الراشى والمرتشى” (*Allah melaknat penyuap dan penerima suap* atau dengan pernyataan lain *laknat Allah atas penyuap dan penerimanya*). Meskipun para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang akibatnya *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.<sup>24</sup> Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi, maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa oleh karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan, maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir<sup>25</sup>

Sanksi takzir bagi pelaku tindak pidana *risywah* ini lebih lanjut dijelaskan oleh al-Tariqi bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekwensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekwensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh sebab itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, untuk membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap menyuap termasuk salah satu dari jenis-jenis kemungkaran yang harus diberantas dari

sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “siapa salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. .”. (HR. Muslim, al-Tirmizi, al-Nasâ’i dan Ahmad). Mengubah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis ini pada dasarnya merupakan tugas yang terletak di pundak pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mengubah kemungkaran ini”<sup>26</sup>

Pernyataan al-Tariqi ini memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan ini. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi, bahkan sejak era orde lama dan orde baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi ini, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.

Para ahli hukum masih berdebat pada tataran makna kata dalam keadaan tertentu bahkan masih ada yang berusaha untuk mencermati kata “dapat” dalam rumusan pasal pidana mati bagi koruptor ini. Kata dapat bersifat fakultatif, sehingga kalau seorang koruptor melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati, maka ia dapat pula tidak dijatuhi hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi koruptor seperti AM ini, sekalipun telah mengakibatkan negara berguncang, jika mengacu pada rumusan pasal ini, maka dapat pula ia tidak dihukum mati. Oleh sebab itu, wacana hukuman mati ini mutlak diperlukan pembahasan komprehensif, simultan, mendalam dan serius dengan melibatkan banyak pihak agar benar-benar bisa membawa kemashatan dan ketenteraman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai penerapan takzir dengan hukuman mati, dalam masalah ini Abdul Qadîr Audah tampaknya sangat berat hati untuk mengatakan bahwa takzir boleh dalam bentuk hukuman mati. Secara tegas ia mengatakan bahwa:

<sup>23</sup> al-Tharîqî, *Jarîmah al-Risywah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 113.

<sup>24</sup> al-Dzahabî, *Kitâb al-Kabâ'ir*, h. 111

<sup>25</sup> Abdul `Azîz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 265.

<sup>26</sup> al-Tharîqî, *Jarîmah al-Risywah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 113.

فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا قتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل

*Seyogyanya sanksi takzir bukan sanksi yang bersifat mematikan, maka dari itu takzir tidak boleh dalam bentuk hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Tetapi mayoritas fukaha membolehkan sebagai pengecualian dari prinsip umum ini, untuk menetapkan hukuman mati sebagai takzir, kalau akan membawa kemaslahatan umum.*<sup>27</sup>

Namun, dalam masalah penentuan jarimah apa yang layak diganjar dengan hukuman mati, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat mereka bisa dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Menurut ulama Hanafiyah

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan sebagai *siyâsah* (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku jarimah-jarimah tertentu yang sangat keji dan dilakukan secara berulang-ulang serta dengan pertimbangan kemaslahatan umum seperti terhadap pelaku pembunuhan dengan benda keras, pelaku sodomi dan terhadap seorang muslim yang berulang kali melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad saw.<sup>28</sup> Demikian juga orang yang berulang kali mencuri, perampok, tukang sihir dan orang-orang zindiq,<sup>29</sup> bahkan seseorang yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tidak halal.<sup>30</sup> Terhadap contoh terakhir tentang perselingkuhan, Abdul Muhsin al-Tariqi mengatakan “وإن لم يرمنه فعلا قبيحا” (walau tidak diketahui secara pasti bahwa lelaki tersebut melakukan perbuatan keji / berzina atau tidak). Tentu dalam masalah perselingkuhan ini akan sangat sulit upaya pembuktiannya, sebab

<sup>27</sup> Lihat Abdul Qadîr Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*, jilid I, h. 687.

<sup>28</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr*, Syarh Tanwîr al-Abshâr, al-Qahirah: al-Maktabah al-Maimuniyyah, 1337 H, jilid IV, h. 62-64.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, T.tp: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t.th. h. 305-306, lihat juga Ibnu Taimiyyah, *Kitâb al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Islâhi al-Râ'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dâr al-Jail, 1988, Cet. ke 2, h. 99.

<sup>30</sup> Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarîmah al-Risywah fi Syarî'ah al-Islâmiyyah ma'a Dirâsati Nizhâmi Muhafafah al-Risywah fi al-Mamlakah al-`Arabiyyah al-Su'ûdiyyah*, T.tp: t.pn, t.th, h. 25.

menuduh berzina pihak lain tanpa bukti juga merupakan jarimah.

#### b. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. Di kalangan ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir, tanpa dibedakan antara pelaku sudah pernah menikah secara sah atau belum.<sup>31</sup> Hal ini merupakan pendapat minoritas ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat mayoritas, mereka tetap tidak mengakui adanya hukuman mati sebagai takzir, sebagaimana dinyatakan Abdul Qadîr Audah sebagai berikut:

لا يبيح الشافعيون ومعظم المالكيين القتل تعزيرا ويفضلون أن يحبس الجاني المفسد الذي يستضر بجرائمه إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة ويؤيدهم في هذه الاتجاه بعض الحنابلة<sup>32</sup>

*(Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah tidak memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati sebagai takzir. Mereka cenderung memilih untuk memperlama masa penahanan (penjara seumur hidup) bagi pelaku kejahatan yang bisa merusak dan membahayakan sampai pada masa yang tidak ditentukan agar kriminalitasnya bisa ditahan/dicegah tidak menyebar di masyarakat. Pendapat seperti ini diikuti oleh sebagian ulama Hanabilah).*

Pernyataan Abdul Qadîr Audah ini tampaknya cukup beralasan, sebab kalau memang mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai takzir, tentu dalam referensi-referensi ulama mazhab Syafi'i seperti *al-Majmû'* karya Imam al-Nawawi, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* dan *al-Hâwi al-Kabîr*, keduanya karya al-Mawardi akan disebutkan. Tetapi ternyata dalam ketiga kitab itu tidak disinggung tentang hukuman mati sebagai takzir.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t.th) h. 306, lihat juga Ibnu Taimiyyah, *Kitâb al-Siyâsah...*, h. 99, Abdul Qadîr Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i*, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992, jilid II, h. 688.

<sup>32</sup> Abdul Qadîr Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*, h. 688.



### c. Menurut ulama kalangan Malikiyah.

Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan seperti hukuman mati bagi mata-mata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh.<sup>33</sup> Tentang boleh dan tidaknya seorang mata-mata perang yang merugikan negara Islam ini dihukum mati, Shâlih al-`Usaimin mengemukakan tiga pendapat. Pendapat yang *pertama* dihukum mati, pendapat *kedua* tidak dihukum mati, dan pendapat *ketiga* tawaqquf, tidak berpendapat. Menurutny, pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama, boleh dibunuh. Alasannya adalah kasus Hatib bin Abi Baltha`ah,<sup>34</sup> jika bukan karena ia termasuk peserta perang Badar, pasti sudah dihukum mati.<sup>35</sup>

Dalam masalah hukuman mati sebagai takzir ini, Abdul Aziz Amir, mengatakan bahwa konon Imam Malik membolehkan hukuman mati diberlakukan kepada kaum Qadariyah karena fasad, bukan karena kemurtadan mereka.<sup>36</sup>

Dalam mengungkapkan pendapat ulama kalangan Malikiyah tentang hukuman mati sebagai takzir ini, Wahbah al-Zuhaili tidak menyinggung tentang eksekusi mati bagi golongan Qadariyah yang konon sebagai pendapat Imam Malik. Al-Zuhaili hanya mengatakan:

وأجاز المالكية والحنابلة وغيرهم قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين ولم يجر أبو حنيفة والشافعي هذا القتل<sup>37</sup>

(Ulama Malikiyah, Hanabilah dan yang lain memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati bagi mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan berita kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i tidak membolehkannya).

<sup>33</sup> Ibnu Taimiyyah, *Kitab al-Siyâsah*. ., h. 98, lihat juga Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t.th.) h. 306, Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarimah al-Risywah fî Syarî'ah*. ., h. 25.

<sup>34</sup> Informasi lengkap dan data-data tentang kasus Hatib bin Balta'ah ini telah penulis kemukakan pada waktu membahas masalah sanksi hukum pelaku khianat pada bab tiga bagian A.4, khianat. Ada baiknya pembaca menelaah ulang uraian penulis pada bagian tersebut.

<sup>35</sup> Muhammad Shâlih al-Usaimin, *Syarh Kitab al-Siyâsah al-Syar'iyah li Syaikh al-Islâmi Ibnu Taimiyyah*, (Ttp : Dâr al-Kutub, 2005), Cet. ke-1, h. 336-337.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t.th.) h. 306, lihat juga Muhammad Shâlih al-Usaimin, *Syarh Kitab al-Siyâsah*. ., h. 337.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), Cet. ke-4, jilid VII, h. 5594-5595.

### d. Menurut ulama kalangan Hanabilah

Sekelompok ulama Hanabilah antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid'ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir.<sup>38</sup>

Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

عن عرفة الأشجعي رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه {رواه مسلم}<sup>39</sup>

(Dari Arfajah al-Asyja'i ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Barang siapa mendatangi kalian, padahal keadaan kalian berada dalam suatu kepemimpinan seseorang (yang sah), orang tersebut datang dengan maksud memecahkan tongkat (persatuan) kalian, atau bermaksud memecah persatuan kalian maka bunuhlah orang tersebut). (HR. Muslim).

Dalam hadis lain riwayat Muslim disebutkan:

عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كأنا من كان {رواه مسلم}<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarimah al-Risywah*. ., h. 26. Cek pada sumber aslinya al-Bahuthi al-Hanbali, *Kasyf al-Qannâ' `an Matn al-Iqna'*, (al-Qahirah: al-Matba'ah al-Syarfiyyah, 1319 H), jilid 6, h. 124.

<sup>39</sup> Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murry al-Nawawi, *al-Minhâj fî Shahîh Muslim ibn al-Hajjôj Syarh al-Nawawi `Ala Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th.), h. 1852.

<sup>40</sup> Kalimat pukullah orang tersebut dengan pedang oleh Imam al-Nawawi ditafsirkan dengan mengatakan:

فيه الأمور بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا

(Dari Ziyad bin `Alaqah berkata, saya mendengar `Arfajah berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda “akan terjadi fitnah dan bid`ah,<sup>41</sup> maka siapa bermaksud memecah persatuan umat ini, padahal mereka dalam persatuan, maka pukullah orang tersebut dengan pedang). (HR. Muslim).

Dari berbagai pendapat para ulama mazhab sebagaimana uraian di atas, bisa diketahui bahwa hukuman mati sebagai takzir terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti pelaku sodomi, orang muslim yang menjadi mata-mata perang dan merugikan kaum muslimin, pelaku bid`ah yang mengajak massa untuk menodai agama Islam, orang muslim yang berulang kali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad saw, dan pelaku sebuah tindak pidana yang berulang kali melakukan tindakan merusak dan merugikan banyak pihak.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sangat patut dan layak untuk dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab itu, semua pihak yang bertugas dan berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak perlu ragu untuk memberlakukan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut agar target pemberantasan korupsi bisa terlaksana dengan baik dan memuaskan.

Oleh sebab itu, menurut penulis para penegak hukum agar tidak perlu ragu dan merasa takut atau bersalah dalam memberlakukan pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga kepada para hakim pada semua tingkat pengadilan agar tidak ragu dalam mengetok palu untuk menggajar seorang koruptor yang terbukti melakukan korupsi

sebagaimana bunyi rumusan pasal 2 ayat 2 tersebut dengan hukuman mati. Hal ini harus diupayakan agar rumusan pasal sebuah undang-undang tidak hanya sebagai jargon simbolis yang tidak bermakna, dan target pemberantasan korupsi di negeri ini bisa terealisasi.

Di samping itu, walaupun dalam rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut hanya disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, namun pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini para jaksa penuntut umum dan para hakim tidak perlu ragu dan merasa bersalah,<sup>42</sup> dalam memberlakukan rumusan pasal ini, karena pidana mati tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam yang di antara ketentuannya terdapat konsep hukuman mati sebagai takzir, tentu saja setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan dengan teliti dan seksama bahwa tindak pidana korupsi benar-benar dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa di antara maksud dari kata “keadaan tertentu” di samping karena tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam bahaya, ketika terjadi bencana nasional, dan pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, juga dimaksudkan sebagai pengulangan tindak pidana. Hal terakhir inilah yang sangat sesuai dengan pendapat ulama kalangan mazhab Hanabilah yang memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai takzir, kalau pelaku berulang kali melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Hal mendasar yang sangat berpotensi membuat hakim ragu atau bahkan takut untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK tahun 1999, di samping faktor-faktor politis, ewuh pekewuh, takut melanggar HAM dan lain-lain, juga disebabkan oleh bunyi rumusan pasal 2 ayat (2) itu sendiri. Sebab dalam pasal tersebut hanya dirumuskan dengan kata “dapat” bukan dengan kata “harus”, sehingga pasal 2 ayat (2) ini bersifat fakultatif, artinya sekalipun tindak pidana korupsi nyata-nyata dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat pula tidak dijatuhkan. Hal ini jelas akan berbeda jika rumusannya bukan dengan kata “dapat” tetapi menggunakan kata “harus”. Walaupun memang dalam rumusan dalam bahasa Arabnya juga menggunakan kata “فيجوز” artinya “dapat” lihat catatan kaki berikutnya.

<sup>43</sup> Mansur al-Bahuthi dalam *Kasyf al-Qannâ’*., jilid VI, h. 124 dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyâsah al-Syar’iyyah* h. 107, awhab nakatagnem aynaudek eplaku tindak pidana yang bersifat merusak dan berulang kali melakukannya bisa dijatuhi hukuman mati sebagai takzir. Secara lengkap disebutkan dalam kitab tersebut:

بقتله فقتل كان هدرا

(Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghukum mati orang yang keluar (membangkan) penguasa atau bermaksud untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dan semacamnya. Hadis ini juga berisi perintah untuk mencegah segala bentuk tindakan seperti ini. Kalau pihak yang dilarang tidak mau berhenti maka dia harus dihukum mati, kalau kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan cara dihukum mati maka darahnya tidak lagi terpelihara) (lihat Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Murry al-Nawawi, *al-Minhôj fi Shahih Muslim ibn al-Hajjôj Syarh al-Nawawi `Ala Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkâr al-Dauliyyah, t.th.), h. 1852.

<sup>41</sup> Imam al-Nawawi menafsirkan kata “هنات هنات” dengan mengatakan:

“والمراد بها هنا الفتنة والأمر بالحادثة” maksud dari kata “hanat” di sini adalah berbagai fitnah dan masalah-masalah baru atau bid`ah.

Dari uraian di atas, bisa penulis simpulkan bahwa jika ditinjau dari perspektif pidana Islam, harus melalui ranah takzir, bukan qishas dan hudud. Di antara pendapat ulama yang membolehkan hukuman mati diberlakukan sebagai takzir adalah ulama kalangan Hanafiyah. Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan sebagai *siyâsah* (pertimbangan politik Negara) bagi pelaku jarimah-jarimah tertentu yang sangat keji. Di kalangan ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat bahwa pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir, tanpa dibedakan antara pelaku sudah pernah menikah secara sah atau belum. Menurut ulama Malikiyah, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan seperti hukuman bagi mata-mata perang yang beragama Islam dan berpihak kepada musuh. Menurut ulama kalangan Hanabilah antara lain Ibnu 'Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin, boleh dihukum mati sebagai takzir. Dengan demikian, jika pelaku gratifikasi seorang pejabat tinggi negara yang mengerti hukum, sekalipun pasti akan menuai pro dan kontra, hukuman mati pantas dijatuhkan kepadanya. Namun jika pelakunya pejabat rendahan atau pegawai biasa dan yang setara dengannya, bisa dilakukan hukuman takzir yang bentuk dan berat ringannya diserahkan kepada hakim yang mewakili pemerintah yang sah.

## Penutup

Dari pembahasan terdahulu terkait dengan status hukum gratifikasi dan sanksinya perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah baik berupa uang, bonus, atau jasa lainnya yang halal kepada petugas atau pejabat pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak ada perjanjian di awal, tidak berlebihan, dan tidak diberikan di muka (sebelum urusan selesai). Pemberi dan penerima dalam kasus ini tidak berdosa. Sebab ini merupakan bagian dari

tanda syukur, berterima kasih kepada yang telah berjasa. Adapun jika pemberian itu dikhawatirkan mempengaruhi mental petugas terkait, ini masuk ranah etika, maksimal hukumnya bisa menjadi makruh lisadd al-dzari'ah. Namun, jika gratifikasi dengan pemberian yang dijanjikan di awal kepada petugas atau pejabat terkait, baik besar atau kecil nilainya, maka hal tersebut termasuk kategori suap (risywah) yang diharamkan. Pemberi dan penerima sama-sama berdosa.

2. Terkait dengan pelaku gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah yang tidak dijanjikan di awal, tidak berlebihan, dan dilakukan setelah selesainya urusan, maka pemberi dan penerima tidak bisa dikenakan sanksi. Sedangkan pemberian hadiah yang dijanjikan di awal, atau diberikan sebelum selesainya urusan, maka dalam pidana Islam bagi pemberi dan penerima dapat dikenai hukuman takzir (bentuk dan besar kecil hukumannya diserahkan kepada hakim resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Walaupun ada juga pendapat ulama fikih yang menyatakan bahwa yang dikenai sanksi hanya penerima, dan pemberi tidak dikenai sanksi jika pemberi memberikan hadiah tersebut dalam rangka memperjuangkan haknya di sistem yang korup. Dalam hal ini dapat diberlakukan kaidah: "al-dharuratu tubih al-mahzhurat" (dalam keadaan darurat, yang haram bisa berupa hukumnya menjadi mubah). Namun, dalam implementasinya dibutuhkan kehati-hatian dengan memperhatikan kaidah fikih yang lain: "al-dharuratu tuqaddaru biqadariha" (kebolehan dalam keadaan darurat itu harus dilakukan seperlunya).

## Pustaka Acuan

- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, Cet. ke-1
- Asfahani, Al-Râghib al-, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H, Juz XIII
- Asnawi, Abd al-Rahîm al-, *Nihâyat al-Sûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984, Jilid I
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Beirut:

---

ومن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتفع بالحدود المقدرة بل استمر عليه فيجوز قتله تعزيراً  
(Siapa berulang kali melakukan sebuah jenis kerusakan dan dia tidak bisa diatasi dengan hukuman hudud yang telah jelas ukurannya, bahkan dia terus menerus melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dijatuhi pidana mati sebagai takzir).

- Dâr al-Ma`rifah, 1379 H, Juz XIII
- Asyûr, Muhammad Thahir ibn, *Tafsîr al-Tahrîr*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, t. th., Jilid XXII
- \_\_\_\_\_, *Maqâsid al-Syarî`ah al-Islâmiyah*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, t. th.
- Audah, Abd al-Qadîr, *al-Tasyrî` al-Jinâ'i al-Islâmi*, Beirut: Mu`assasah al-Risâlah, 1992, Juz II, Cet. ke-11, h. 290
- Azdiy, Sulaiman ibn al-Asy`as Abu Daud al-Sijistani al-, *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th., Juz III, IV
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Badsyah Amir, *Taysîr al-Tahrîr Syarh al-Tahrîr li Ibn al-Humam*, Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi, 1351H, Jilid IV
- Bahansi, Ahmad Fathi, *al-`Uqûbah fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, Kairo: Maktabah Dar al-`Urubah, 1961, Cet. ke-2
- \_\_\_\_\_, *Nazhariyyât fi al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmi*, Kairo: al-Syirkah al-`Arabiyyah, 1963
- Baihaqî, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Mûsâ Abû Bakr al-, *Sunan al-Baihaqî*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994, Juz III, VIII
- \_\_\_\_\_, *Majma`u al-Zawa'id wa Manba`u al-Fawâ'id*, Beirut: Dâr al-Rayyan li al-Turâts Dâr al-Kitâb al-`Arabi, 1407 H, Juz, VII
- \_\_\_\_\_, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th., Juz VIII
- Baitar, Muhammad Bahjah al-, *Hayât Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, T.t.: al-Maktab al-Islâmi, t. th.
- Baqî, Muhammad Fuad Abd al-, *al-Mu`jam al-Mufahrasy li Alfâdz al-Qur`ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978
- Bayanuni, Abu al-Fattah al-, *Dirâsât fi al-Ikhtilâf al-Fiqhiyyah*, T.tp.: Dâr al-Salâm, 1983
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, Cet. ke-1, Jilid I.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillâh al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr ibn Katsîr al-Yamâmah, 1987, Cet. ke-3, Juz II
- \_\_\_\_\_, *al-Jâmi` al-Shahîh al-Mukhtashar*, Beirut: Dâr ibn Katsîr al-Yamâmah, 1987, Juz VI
- Bultaji, Muhammad, *Manhaj al-Tasyrî` al-Islâmi fi al-Qarni al-Tsâni al-Hijri*, Universitas Islam Muhammad ibn Saud, 1977, Jilid II
- Busti, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Taimiy al-, *Shahîh ibn Hibbân*, Beirut: Mu`assasah al-Risâlah, 1993, Cet. ke-2, Juz VIII
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, Cet. ke-2, edisi kedua
- Dimiyati, Muhammad Syatha, *I`ânat al-Thâlibîn*, Bandung: Maktabah Dahlan, t. th.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, Cet. ke-1
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982, h. X
- Fandi, Muhammad Sabit al-, et.al, *Dairah al-Ma`ârif al-Islâmiyah*, t.t.: t.p., t.th., Juz I
- Fasi, al-Tsa'alibi al-, *Al-Fikr al-Sâmi fi Tarîkh al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995, Jilid III
- Ghazali, Muhammad ibn Muhammad al-, *Al-Mustashfâ Min 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., Jilid II
- Hakim, Muhammad ibn Abdillâh Abû Abdillâh al-, *al-Mustadrak `alâ al-Shahîhaini*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990, Juz III
- Hasaballah, Ali, *Ushûl al-Tasyrî` al-Islâmi*, Kairo: Dâr al-Ma`ârif, 1964
- Jurjani, Sayyid Ali Muhammad ibn Ali al-, *Al-Ta`rifât*, Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, 1988.
- Mahalli, Jalaluddin al-, *al-Waraqât fi Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1315 H.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fi Fiqh al-Awlawiyyât Dirasah Jadidah fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- \_\_\_\_\_, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-`Arabi, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Syarî`at al-Islam Shalihât li al-Tathbiq fi Kullî Zaman wa Makan*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Fatâwa Mu`âshirah*, Kairo: Dâr al-Âfaq al-Ghad, 1981, Cet. ke-2
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, Cet. ke-1.
- Raisuni, Ahmad al-, *Nazhariyât al-Maqâshid `inda al-Syâthibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1999, Cet. ke-5
- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman al-, *Al-Itqân fi `Ulûm al-Qur`ân*, Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1317, Jilid II
- Syarifuddin, Amir, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. ke-1, Jilid I dan II.
- Syâthibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. th., Jilid II
- Zakariya, Abu al-Hasan Ahmad Faris ibn, *Mu`jam Maqâyis al-Lughah*, Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi, 1070 H.